



**BAGIAN ANGGARAN 005.03
BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG

PENGADILAN NEGERI BANTUL

SEMESTER II TAHUN 2016

BAGIAN ANGGARAN 005.03



LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PENGADILAN NEGERI BANTUL

BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SEMESTER II
TAHUN ANGGARAN 2016

Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04
Telp. 0274367348 Fax. 0274367348
Bantul - DI Yogyakarta 55711
e-mail : pn_bantul@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dan kewajiban tersebut. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 6 tahun 2006 tentang pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN dan belanja, sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap maupun aset lainnya.

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem

penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (*disposal*).

Semoga Laporan Barang Milik Negara yang Kami susun untuk Periode Semester II tahun 2016 bisa membantu dalam membuat laporan keuangan di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan Predikat atas penilaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Bantul, 16 Januari 2017
Kuasa Pengguna Barang



NIKEN KUSUMARATRI S, S.H.
NIP. 198305262002122001

DAFTAR ISI

	hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
I. Pendahuluan	1
II. Dasar Hukum	4
III. Kebijakan Akuntansi BMN	6
3.1. Aset Tetap	7
3.1.1. Tanah	7
3.1.2. Gedung dan Bangunan	7
3.1.3. Peralatan dan Mesin	7
3.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	8
3.1.5. Aset Tetap Lainnya	8
3.1.6. Konstruksi dalam Pengerjaan	8
3.1.7. Aset Barang Bersejarah	9
3.2. Persediaan	9
IV. Laporan BMN	11
4.1. Proses Penyusunan Laporan Barang Milik Negara	11
4.2. Laporan Barang Milik Negara	12
4.2.1. Aset Tetap	15
4.2.2. Barang Persediaan	15
4.2.3. Konstruksi Dalam Pengerjaan	16
4.3. Posisi Barang Milik Negara di Neraca	16

V.	Kendala dan Saran	18
	5.1. Kendala	18
	5.2. Saran	18
VI.	Penutup	19
Lampiran		
	A. Catatan Ringkas Barang Milik Negara	
	B. Laporan Barang Intrakomptabel	
	C. Laporan BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	
	D. Laporan Kontruksi Dalam Pengerjaan	
	E. Laporan Aset Tak Berwujud	
	F. Laporan Persediaan dan BA Opname Fisik	
	G. Laporan Posisi BMN dan Keuangan di Neraca	
	H. Berita Acara Rekonsiliasi Internal BMN dengan Keuangan	
	I. Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPKNL	
	J. Laporan Kondisi Barang	
	K. Berita Acara IP	

I. PENDAHULUAN

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berasal dari hibah dan rampasan/sitaan.

Tidak termasuk pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh :

1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dai APBN tetapi sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah)
2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari :
 - a. Perusahaan Perseroan, dan
 - b. Perusahaan Umum.
3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

BMN DALAM SAPP

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. sedangkan aset

lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Adapun aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BMN yang berupa aset lancar adalah Persediaan. Sedangkan BMN yang berupa aset tetap meliputi tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. BMN yang berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi/dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dimasukkan ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Secara tersurat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga atau instansi dikenal adanya Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di pihak lain. Dalam rangkian pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan. Sedangkan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Dalam prakteknya, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga. SIMAK-BMN selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawabn, juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang. Oleh karena itu, keluaran SIMAK-BMN juga memberikan manfaat kepada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya.

SIMAK-BMN diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN dengan prinsip-prinsip:

- a. Ketaatan, yaitu SIMAK-BMN diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-undangan.

- b. Konsistensi, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Kemampubandingan, yaitu SIMAK-BMN menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.
- d. Materialitas, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.
- e. Obyektif, yaitu SIMAK-BMN dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- f. Kelengkapan, yaitu SIMAK-BMN mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

Laporan yang tersaji dalam SIMAK-BMN merupakan penunjang dari terciptanya Laporan Keuangan yang baik dan tepat secara keseluruhan, karena anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Modal khususnya dan belanja barang yang dikapitalisasi dan yang menjadi Barang Persediaan semua diinventarisir dan dilaporkan melalui SIMAK-BMN.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodifikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
14. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
16. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
17. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/Pmk.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Penswertipkatan Barang Milik Negara Berupa Tanah.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BMN

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain.

Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas untuk Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara terdapat 2 Klasifikasi Barang Milik Negara yang harus di lakukan pengelolaan dan pelaporannya.

3.1 ASET TETAP

A. TANAH

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada yang bersifat permanen.

B. GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

C. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa

manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

E. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu nilai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

F. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau belum selesai perolehannya pada tanggal pelaporan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

G. ASET BARANG BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS)

Aset Barang Bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset Barang Bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset Barang Bersejarah adalah bangunan Barang Bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset Barang Bersejarah,

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

3.2 PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

IV. LAPORAN BMN

4.1. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN

Proses yang dilakukan dalam menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) ini berjenjang mulai dari setiap satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang/UAKPB) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, di tingkat inilah dituntut ketelitian dan ketepatan dalam menginventarisir dan membukukan data setiap Barang Milik Negara yang diperoleh maupun yang dikeluarkan, dengan cara menginput setiap perolehan, penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan dengan menggunakan Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan Aplikasi Barang Persediaan.

Proses berawal dari penginputan data BMN di setiap Satker dengan berdasar kepada Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), data kontrak pekerjaan, SPM, SP2D (untuk yang perolehan pembelian) dan data-data pendukung lainnya. Hal tersebut berlaku juga untuk Barang Persediaan.

Data BMN yang sudah diinput tersebut, yang didalamnya juga termasuk nilai persediaan kemudian dilakukan rekon internal antara bagian barang dengan bagian keuangan untuk mencocokkan neraca, terutama untuk mengecek keakuratan data BMN perolehan pembelian. Kemudian data yang sudah sama hasil rekonsiliasi internal kemudian dilakukan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat. Hasil dari rekonsiliasi dengan KPKNL diterbitkan BAR yang kemudian data (ADK Backup) SIMAK-BMN dari seluruh satuan kerja yang sudah siap dikirim ke Tingkat Wilayah.

Proses selanjutnya di tingkat wilayah dilakukan kompilasi dengan cara penerimaan ADK menggunakan aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAPPBW (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah). Proses yang sama yaitu melakukan rekonsiliasi internal tingkat wilayah dengan bagian keuangan, kemudian hasilnya dilakukan rekonsiliasi berikutnya dengan Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara baik secara keseluruhan maupun satu persatu tingkat satker. Untuk tahun ini sudah mulai dilakukan Rekonsiliasi dengan Sistem, yaitu Modul SIMAK-

BMN, sehingga proses penyamaan data dilakukan secara Otomatis. Proses tersebut di atas dilakukan berjenjang ke Tingkat Eselon 1, dan kemudian ketingkat Pengguna Barang yaitu tingkat Kementerian/Lembaga.

Terhitung mulai Tahun Anggaran 2013, pelaporan Aset BMN disajikan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

4.2. LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Laporan Barang Milik Negara UAKPB Pengadilan Negeri Bantul Semester II tahun 2016 telah dilakukan pengumpulan dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan tata cara dan jadwal yang terdapat pada Perdirjen KN Nomor 07 Tahun 2009.

Total Nilai aset/BMN yang tercatat di Laporan tingkat UAKPB Pengadilan Negeri Bantul adalah sebesar Rp. 266.750 dengan rincian sebagai berikut:

<i>NAMA ASET</i>	<i>NILAI RUPIAH</i>
Persediaan	266.750
Tanah	0
Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0
Aset Tetap Lainnya	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0
Akumulasi Penyusutan Mesin	
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan	

Jaringan		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		
Aset tak Berwujud		0
Aset Lainnya		0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya		
Total		266.750

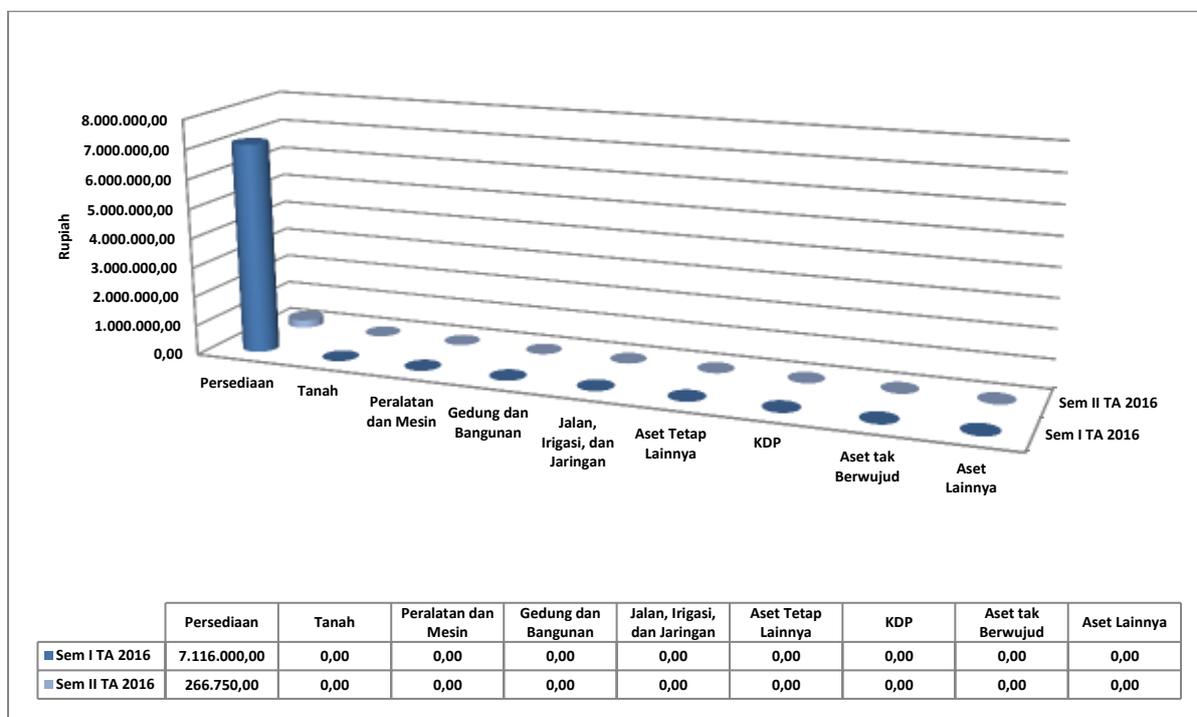
Berikut tabel dan grafik peningkatan nilai BMN semester I 2016 dengan Semester II 2016.

*TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI BANTUL
SEMESTER I TAHUN 2016 DAN SEMESTER II TAHUN 2016
(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)*

<i>NAMA ASET</i>	<i>SEMESTER I TA 2016</i>	<i>SEMESTER II TA 2016</i>
Persediaan	7.116.000	266.750
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		
Akumulasi Penyusutan		

Gedung dan Bangunan		
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		
Aset tak Berwujud	0	0
Aset Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya		
Ekstrakomptabel	0	0
Total	7.116.000	266.750

TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI BANTUL
SEMESTER I TAHUN 2016 DAN SEMESTER II TAHUN 2016
(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)



4.2.1. ASET TETAP

- a. Nilai Aset Tanah pada Pengadilan Negeri Bantul semester II tahun 2016 tidak mengalami perubahan nilai.
- b. Nilai Peralatan dan mesin pada Pengadilan Negeri Bantul semester II tahun 2016 tidak mengalami perubahan nilai.
- c. Nilai Gedung dan bangunan pada Pengadilan Negeri Bantul semester II tahun 2016 tidak mengalami perubahan nilai..
- d. Nilai Jalan, irigasi, dan jaringan pada Pengadilan Negeri Bantul semester II tahun 2016 tidak mengalami perubahan nilai.
- e. Nilai Aset Tetap Lainnya pada Pengadilan Negeri Bantul semester II tahun 2016 tidak mengalami perubahan nilai.
- f. Nilai Aset tak Berwujud pada Pengadilan Negeri Bantul semester II tahun 2016 tidak mengalami perubahan nilai.
- g. Nilai Aset Lainnya pada Pengadilan Negeri Bantul semester II tahun 2016 tidak mengalami perubahan nilai.

4.2.3. PERSEDIAAN

Nilai Persediaan pada Pengadilan Negeri Bantul semester II tahun 2016 mengalami perubahan nilai berkurang sebesar Rp. 6.849.250.

TABEL NILAI PERSEDIAAN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI BANTUL

SEMESTER I TAHUN 2016 DAN SEMESTER II TAHUN 2016

<i>PERSEDIAAN</i>	<i>SEMESTER I TA 2016</i>	<i>SEMESTER II TA 2016</i>
Barang Konsumsi	7.116.000	266.750
Amunisi	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada	0	0

<i>PERSEDIAAN</i>	<i>SEMESTER I TA 2016</i>	<i>SEMESTER II TA 2016</i>
masyarakat		
Bahan Baku	0	0
Barang dalam Proses	0	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
Persediaan lainnya	0	0

4.2.3 KONTRUKSI DALAM Pengerjaan

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan pada Pengadilan Negeri Bantul semester II tahun 2016 tidak mengalami perubahan nilai.

4.3 POSISI BMN DI NERACA

Untuk Neraca pada UAKPB Pengadilan Negeri Bantul semester II tahun 2016 tercapai keseimbangan (sama) atau selisih Nihil antara neraca Barang Milik Negara dengan neraca Keuangan. Berikut tabel Neraca UAKPB dan UAKPA Pengadilan Negeri Bantul semester II tahun 2016.

*TABEL PERBANDINGAN NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI BANTUL
SEMESTER II TAHUN 2016*

<i>NAMA ASET</i>	<i>UAKPA</i>	<i>UAKPB</i>
Persediaan	266.750	266.750
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0

<i>NAMA ASET</i>	<i>UAKPA</i>	<i>UAKPB</i>
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Aset tak Berwujud	0	0
Aset Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	0	0
Total	266.750	266.750

V. KENDALA DAN SARAN

5.1. KENDALA

-

5.2. SARAN

-

VI. PENUTUP

Data yang disajikan dalam laporan Barang Milik Negara Pengadilan Negeri Bantul semester II tahun 2016 sudah dilakukan verifikasi data, sebagai filter dalam membuat laporan yang akurat.

Mudah-mudahan laporan yang Kami susun bisa membantu Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyusunan laporan Barang Milik Negara di tingkat Kementerian Negara/Lembaga dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan, dan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan agar menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel, sehingga predikat *Wajar Dengan Pengecualian (WDP)* yang masih diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas Hasil Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011 bisa ditingkatkan pada tahun 2012 menjadi *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* dan secara umum terus bisa meningkatkan kualitas dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Sepenuhnya dibidang Anggaran, Manajemen Aset (BMN) dan Pelaporannya pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di Bawahnya.

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

PADA LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA

**UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI BANTUL
BAGIAN ANGGARAN 005.03
SEMESTER II TAHUN 2016**

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodifikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga;
13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

b. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Bantul yang merupakan bagian dari instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia, bagian anggaran Badan Peradilan Umum.

c. Periode Pelaporan

Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang ini merupakan pelaporan atas periode Semester II Tahun Anggaran 2016.

II. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain. Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

III. Pendekatan Penyusunan Laporan

Laporan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Bantul Semester II Tahun Anggaran 2016 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Pengadilan Negeri Bantul.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bantul ini adalah sebesar Rp. 266.750 (*dua ratus*

enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp. 7.116.000 (*tujuh juta seratus enam belas ribu rupiah*) dan nilai mutasi yang terjadi selama Semester II Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. -6.849.250 (*minus enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah*). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Pengadilan Negeri Bantul;
14. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. Ringkasan Barang Milik Negara per 31 Desember 2016

1. Saldo Awal Semester II TA 2016

Nilai BMN per 30 juni 2016 menurut Laporan Barang Pengguna Pengadilan Negeri Bantul adalah sebesar Rp. 7.116.000 (*tujuh juta seratus enam belas ribu rupiah*) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*) dan nilai persediaan sebesar Rp. 7.116.000 (*tujuh juta seratus enam belas ribu rupiah*).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara

Mutasi BMN per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

a. Barang Persediaan

Saldo persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 266.750 (*dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 7.116.000 (*tujuh juta seratus enam belas ribu rupiah*) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp. -6.849.250 (*minus enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal (Rp.)	Mutasi (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
Barang Konsumsi	7.116.000	-6.849.250	266.750
Amunisi	0	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0	0
Suku Cadang	0	0	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0	0
Bahan Baku	0	0	0
Barang dalam Proses	0	0	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0	0
Persediaan lainnya	0	0	0
Jumlah	7.116.000	-6.849.250	266.750

b. Tanah

Tidak ada jenis barang Tanah pada Badan Peradilan Umum

c. Peralatan dan Mesin

Tidak ada jenis barang Peralatan dan Mesin pada Badan Peradilan Umum

d. Gedung dan Bangunan

Tidak ada jenis barang Gedung dan Bangunan pada Badan Peradilan Umum

e. **Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Tidak ada jenis barang Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Badan Peradilan Umum

f. **Aset Tetap Lainnya**

Tidak ada jenis barang Aset Tetap Lainnya pada Badan Peradilan Umum

g. **Konstruksi dalam Pengerjaan**

Tidak ada jenis barang Konstruksi dalam Pekerjaan pada Badan Peradilan Umum

h. **Aset Lainnya**

Tidak ada jenis barang Aset Lainnya pada Badan Peradilan Umum

i. **BMN berupa Aset Bersejarah**

Tidak ada jenis barang BMN berupa Aset Bersejarah pada Badan Peradilan Umum

3. Barang Milik Negara

a. **BMN per akun neraca**

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 266.750 (*dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*). Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL		GABUNGAN	
		RP.	%	RP.	%	RP.	%
Aset Lancar							
	Persediaan	266.750		0		266.750	
	Sub Jumlah	266.750		0		266.750	
Aset Tetap							
	Tanah	0		0		0	
	Peralatan dan Mesin	0		0		0	
	Gedung dan	0		0		0	

NO.	URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL		GABUNGAN	
		RP.	%	RP.	%	RP.	%
	Bangunan						
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0		0		0	
	Aset Tetap Lainnya	0		0		0	
	Konstruksi dalam Pengerjaan	0		0		0	
	Sub Jumlah						
	Aset Lainnya						
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0		0		0	
	Aset tak Berwujud	0		0		0	
	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah	0		0		0	
	Total	266.750		0		266.750	

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember 2016 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut :

URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL		GABUNGAN	
	RP.	%	RP.	%	RP.	%
Aset Tetap						
Peralatan mesin						
Gedung dan Bangunan						
Jalan, Irigasi, dan Jaringan						

URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL		GABUNGAN	
	RP.	%	RP.	%	RP.	%
Aset Tetap Lainnya						
Aset Lainnya	0		0		0	
Kemitraan dengan pihak ketiga						
Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah						
Total	0		0		0	

- b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan
Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember 2016 per akun neraca adalah sebagai berikut :

NAMA ASET	LAPORAN BARANG	LAPORAN KEUANGAN	SELISIH
Persediaan	266.750	266.750	0
Tanah	0	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
Aset tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Total	266.750	266.750	0

V. Informasi BMN Lainnya

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan secara berikut :

NO	PERIODE PELAPORAN	NILAI BMN		PERKEMBANGAN	
		RP.		RP.	%.
1	Sem II TA 2014	6.789.100			
2	Sem I TA 2015	3.351.350		(3.437.750)	
3	Sem II TA 2015	5.466.950		2.115.600	
4	Sem I TA 2016	7.116.000		1.640.050	
5	Sem II TA 2016	266.750		(6.849.250)	

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	SUDAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN		BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	
		RP.		RP.	
1	Tanah		0		0
2	Peralatan dan Mesin		0		0
3	Gedung dan Bangunan		0		0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0		0
5	Aset Tetap Lainnya		0		0
	Jumlah		0		0

b. Pengelolaan BMN

NO	URAIAN	PENGGUNAAN	PEMANFAATAN	PEMINDAHTANGANAN	PENGHAPUSAN	JUMLAH
		RP.	RP.	RP.	RP.	RP.
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke pengguna barang	0	0	0	0	0
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke pengelola barang	0	0	0	0	0
3	Dalam proses pengelola barang	0	0	0	0	0
4	Selesai di pengelola barang	0	0	0	0	0
	a. Dikembalikan	0	0	0	0	0
	b. Ditolak	0	0	0	0	0
	c. Disetujui	0	0	0	0	0
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
6	Telah diterbitkan keputusan dari pengguna barang	0	0	0	0	0
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
9	Selesai Serah Terima	0	0	0	0	0

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan BMN tersebut di atas, tidak terdapat proses pengelolaan yang gagal/batal dilaksanakan.

C. Pengelolaan BMN Idle

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	0
2	Ditetapkan sebagai BMN idle oleh pengelola	0
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN idle oleh pengelola	0
4	Telah diterbitkan Keputusan penghapusan dari pengguna	0
5	Selesai serah terima kepada pengelola	0

3. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang**a. Daftar barang hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang**

Nilai BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari BMN Intrakomptabel sebesar Rp. 0 (nol rupiah). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember 2016 dan disajikan sebagai Daftar Barang Hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut :

NO	PERKIRAAN NERACA	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU
1	-	-	-
2	...		

b. Daftar barang dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang

Nilai BMN dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari BMN Intrakomptabel sebesar Rp. 0 (nol rupiah). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran

Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember 2016 dan disajikan sebagai Daftar Barang dengan Kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut :

NO	PERKIRAAN NERACA	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU
1	-	-	-

2

4. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan BMN :

1. Tidak ada permasalahan

5. Langkah-langkah Strategis sebagai Alternatif Permasalahan Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN , langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. -
2.

Penanggungjawab Laporan Barang Kuasa Pengguna
Semesteran Pengadilan Negeri Bantul
per 31 Desember 2016
Kuasa Pengguna Barang,



NIKEN KUSUMARATRI S, S.H.
NIP. 198305262002122001

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA SEMESTERAN
 INTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
 SEMESTER II
 TAHUN ANGGARAN 2016

Tanggal : 11-01-2017
 Halaman : 1
 Kode Lap. : LBSISSKS

NAMA UAKPB : 005.03.04.400173 BADILUM PENGADILAN NEGERI BANTUL

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JULI 2016		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2016	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0	0	0	0	0	0	0	0
....	TIDAK ADA DATA		0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL			0		0		0		0

Bantul, 9 Januari 2017
 Penanggung Jawab UAKPB
 Pjt. Sekretaris



Niken Kusumaratri S. S.H.
 198305262002122001

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA SEMESTERAN
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
 SEMESTER II
 TAHUN ANGGARAN 2016

Tanggal : 11-01-2017
 Halaman : 1
 Kode Lap. : LBSGSSKS

NAMA UAKPB : 005.03.04.400173 BADILUM PENGADILAN NEGERI BANTUL

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JULI 2016		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2016	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0	0	0	0	0	0	0	0
.....	TIDAK ADA DATA		0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL			0		0		0		0

Bantul, 9 Januari 2017
 Penanggung Jawab UAKPB
 Pjt. Sekretaris

 Niken Kusumawati S. S.H.
 198305262002122001



UAPB : MAHKAMAH AGUNG
UAPPB-E1 : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
UAPPB-W : pengadilan tinggi yogyakarta

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2016
TAHUN ANGGARAN :2016

UAKPB : BADILUM PN BANTUL
KODE UAKPB : 005030400400173000KD

KODE	URAIAN	NILAI PER 31 DESEMBER 2016
117111	BARANG KONSUMSI	
1010301004	PENGHAPUS/KOREKTOR	40,200
000004	- Correction Tape	40,200
1010301010	ALAT PEREKAT	60,600
000008	- Lem Kertas Cair	21,000
000009	- Lem Kertas Stick	39,600
1010301013	ISI STAPLES	15,950
000001	- isi stapler 23/15	15,950
1010304004	TINTA/TONER PRINTER	150,000
000001	- CARTRID 2180 EPSON	150,000
	Jumlah	266,750

Keterangan:

1. Persediaan senilai Rp. 0,- dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0,- dalam kondisi usang.

Disetujui tanggal : 6 Januari 2017

Kuasa Pengguna Barang,
Plt. Sekretaris



Niken Kusumaratri S, S.H.
198305262002122001

Bantul, 31 Desember 2016
Petugas Pengelola Persediaan,
Operator

Wirawan Dwi A
19820501 200904 1 007



BERITA ACARA OPNAME FISIK PERSEDIAAN PENGADILAN NEGERI BANTUL

Nomor: W13.U5/ 2022/PL.07/XII /2016

Satker : Pengadilan Negeri Bantul
Kode : 005.03.0400.400173.000.KD
UAPPB-W : Pengadilan Tinggi Yogyakarta
UAPPB-E1 : Badan Peradilan Umum

Pada hari ini Jumat tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu enam belas bertempat di kantor Pengadilan Negeri Bantul jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. nomor 4 Bantul, kami yang bertanda tangan di bawah ini, tim opname fisik persediaan:

1. Nama : Johan Wahudi, S.E.
NIP : 19770422 200912 1 001
Jabatan : Ketua tim
2. Nama : Wirawan Dwi Asmara
NIP : 19820501 200904 1 007
Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Mohammad Jazuri
NIP : 19700727 201212 1 003
Jabatan : Anggota

Menyatakan bahwa telah melakukan Stock Opname barang persediaan **Semester II Tahun 2016**, sebagaimana terlampir dalam lampiran Berita Acara Opname Fisik (Stock Opname).

Demikian Berita Acara Persediaan ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2016 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan :

Nama Tanda Tangan

Johan Wahyudi, S.E.

Wirawan Dwi Asmara

Mohammad Jazuri



Mengetahui,
Pdt. Sekretaris

Niken Kusumaratri S, S.H.
NIP. 198305262002122001

**LAMPIRAN BERITA ACARA OPNAME FISIK
LAPORAN HASIL OPNAME FISIK BARANG PERSEDIAAN**

Satker : Pengadilan Negeri Bantul
Kode : 005.03.0400.400173.000.KD
UAPPB-W : Pengadilan Tinggi Yogyakarta
UAPPB-E1 : Badan Peradilan Umum

No	Nama barang	Kode barang		Kuantitas barang			Kondisi barang		
		Kode Sub kelompok barang	Kode barang	Menurut Lap. Persediaan	Hasil Cek Fisik	Selisih	Baik	Usang	Rusak
1.	Correction Tape	1010301004	000004	6	6	0	✓		
2.	Lem kertas cair	1010301010	000008	6	6	0	✓		
3.	Lem Kertas Stick	1010301010	000009	9	9	0	✓		
4.	Isi staples 23/15	1010301013	000001	1	1	0	✓		
5.	epson 2180	1010304004	000001	1	1	0	✓		

Tim Pelaksana Opname Fisik

1. Johan Wahyudi, S.E.
2. Wirawan Dwi A
3. Mohammad Jazuri

Mengetahui,
Ptt. Sekretaris



Niken Kusumaratri S, S.H.
NIP. 198305262002122001



UPPB-Eselon : Mahkamah Agung RI
 UAPPB W-Prop.D.I.Yogyakarta

LAPORAN HASIL INVENTARISASI BARANG PERSEDIAAN
 STOCK OPNAME
 Per 31 Desember 2016

Kode Satuan Kerja : 005.03.0400.400173.000.KD
 Nama Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Bantul

NO.	Kode Barang		Nama Barang	Type / Merk	Tahun Perolehan	Kuantitas Barang			Satuan	Harga Satuan (Rp)	jumlah	Kondisi Barang			KET.
	Kode Sub-sub Kelompok	Kode Barang				Menurut Administrasi	Hasil Inventarisasi	Selisih				B	R	U	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1010301004	000004	Correction Tape	faber castel	2016	6	6	0	buah	6.700	40.200	X			
2	1010301010	000008	Lem kertas cair	povinal	2016	6	6	0	buah	3.500	21.000	X			
3	1010301010	000009	Lem Kertas Stick	Uhu	2016	9	9	0	buah	4.400	39.600	X			
4	1010301013	000001	Isi staples 23/15	Kangaro	2016	1	1	0	buah	15.950	15.950	X			
5	1010304004	000001	epson 2180	Epson	2016	1	1	0	set	150.000	150.000	X			
											266.750				total

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2016
TAHUN ANGGARAN 2016

Tanggal : 11-01-2017
Halaman : 1
Kode Lap. : LBAPKT

NAMA UAKPB : 005.03.04.400173.000 BADILUM PENGADILAN NEGERI BANTUL

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	266,750
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0
J U M L A H		266,750

Bantul, 9 Januari 2017
Penanggung Jawab UAKPB
Plt. Sekretaris

Niken Kusumawati S. S.H.
198305262002122001



LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2016
TAHUN ANGGARAN 2016

Tanggal : 11-01-2017
Halaman : 1
Kode Lap. : LBAPKT

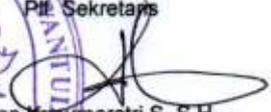
NAMA UAKPB : 005.03.04.400173.000 BADILUM PENGADILAN NEGERI BANTUL

AKUN NERACA		JUMLAH		
KODE	URAIAN	NILAI BMN	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
1	2	3	4	5
117111	Barang Konsumsi	266,750	0	266,750
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
J U M L A H		266,750	0	266,750

Bantul, 9 Januari 2017

Penanggung Jawab UAKPB

Pjt. Sekretaris


Niken Kusumaratri S. S.H.
198305262002122001



**NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: LSAIKB
Tanggal : 11/01/17
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROPINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 400173 PENGADILAN NEGERI BANTUL

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Persediaan	266,750
JUMLAH ASET LANCAR	266,750
JUMLAH ASET	266,750
EKUITAS	
EKUITAS	
Ekuitas	266,750
JUMLAH EKUITAS	266,750
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	266,750

Bantul, 09 Januari 2017

Pt. Sekretaris



Niken Kusumaratri S, S.H.
NIP. 198305262002122001



PENGADILAN NEGERI BANTUL

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Bantul

Telp/Fax: 0274-367348, email: pn_bantul@yahoo.co.id, http:www.pn-bantul.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL PERIODE SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : W13-U5/2016/PL.07/XII/2016

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Pengadilan Negeri Bantul, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Johan Wahyudi, S.E.
NIP : 19770422 200912 1 001
Jabatan : Plt. Kasubbag. Umum dan Keuangan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Pengadilan Negeri Bantul, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

II. Nama : Johan Wahyudi, S.E.
NIP : 19770422 200912 1 001
Jabatan : Plt. Kasubbag. Umum dan Keuangan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Pengadilan Negeri Bantul, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Pengadilan Negeri Bantul dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (LKKPA) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode Semester II Tahun Anggaran 2016, dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Semester II Tahun Anggaran 2016		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	POSISI BMN DI NERACA	7.116.000	(6.849.250)	266.750
A	ASET LANCAR	7.116.000	(6.849.250)	266.750
1	Persediaan	7.116.000	(6.849.250)	266.750
B.	ASET TETAP	0	0	0
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
7	Akum. Penyusutan Aset Tetap	0	0	0
C.	ASET LAINNYA	0	0	0
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0
2	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
3	Aset Lain-lain	0	0	0
4	Akum. Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0
II	BMN NON NERACA	0	0	0
A	EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0
1	BMN Ekstrakomptabel	0	0	0
2	Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel	0	0	0
B	BPYBDS	0	0	0
C	BARANG HILANG	0	0	0
D	BARANG RUSAK BERAT	0	0	0
	TOTAL (I + II)	7.116.000	(6.849.250)	266.750

- II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBKP dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Semester II Tahun Anggaran 2016 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama,



Johan Wahyudi, S.E.
NIP. 19770422 200912 1 001

Pihak Kedua,



Johan Wahyudi, S.E.
NIP. 19770422 200912 1 001



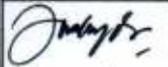
Mengetahui,
Pik. Sekretaris



Niken Kusumawati Sudarmaji, S.H.
NIP. 198305262002122001

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN
LINGKUP INTERNAL PENGADILAN NEGERI BANTUL

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
 keuangan	 barang

II. PERIODE	
S	II / 1 6

III. UNIT ORGANISASI	
1. Kode	0 0 5 - 0 3 - 0 4 0 0 - 4 0 0 1 7 3 - 0 0 0 - K D
2. Nama	PENGADILAN NEGERI BANTUL

IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN				
NO	PERKIRAAN NERACA	SAK	SIMAK-BMN	KESEPAKATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	POSISI BMN DI NERACA	7.116.000	7.116.000	7.116.000
A	ASET LANCAR	7.116.000	7.116.000	7.116.000
1	Persediaan	7.116.000	7.116.000	7.116.000
B	ASET TETAP	0	0	0
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0
4	Gedung dan Bangunan	0	0	0
5	Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0
6	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
7	Akum. Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
8	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
9	Akum. Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0
10	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
C	ASET LAINNYA	0	0	0
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0
2	Akum. Penyusutan	0	0	0
3	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
4	Aset Lain-lain	0	0	0
5	Akum. Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0
II	BMN NON NERACA	0	0	0
A	EKSTRAKOMPTABEL	0		
1	BMN Ekstrakomptabel	0	0	0
2	Akum. Penyusutan	0	0	0
B	BPYBDS	0	0	0
C	BARANG HILANG	0	0	0
D	BARANG RUSAK BERAT	0	0	0
	TOTAL (I + II)	7.116.000	7.116.000	7.116.000

V. DATA KOREKSI SALDO AWAL NILAI BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI (8) = (3) + (4) - (5)
			TAMBAH	KURANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
I	POSISI BMN DI NERACA	0	0	0	0
A	ASET LANCAR	0	0	0	0
1	Persediaan	0	0	0	0
B	ASET TETAP	0	0	0	0
1	Tanah	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
3	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
4	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
5	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
6	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
7	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
8	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
9	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
10	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0
C.	ASET LAINNYA	0	0	0	0
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0
2	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
3	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0
4	Aset Lain-lain	0	0	0	0
5	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
II	BMN NON NERACA	0	0	0	0
A	EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0	0
1	BMN Ekstrakomptabel	0	0	0	0
2	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
B	BPYBDS	0	0	0	0
C	BARANG HILANG	0	0	0	0
D	BARANG RUSAK BERAT	0	0	0	0
TOTAL (I + II)		0	0	0	0

VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL	TOTAL
				(3) + (3) + (4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
I	POSISI BMN DI NERACA	0	0	0
A	ASET LANCAR	0	0	0
1	Persediaan	0	0	0
B.	ASET TETAP	0	0	0
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
C	ASET LAINNYA	0	0	0
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0
2	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
3	Aset Lain-lain	0	0	0
II	BMN NON NERACA	0	0	0
A	BMN EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0
B	BPYBDS	0	0	0
TOTAL (I + II)		0	0	0

VII. DATA TRANSAKSI BMN NON KEUANGAN

a. MUTASI TAMBAH BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	Transfer Masuk		0
		Hibah Masuk		0
		... Dst		0
2	Peralatan dan Mesin	Transfer Masuk		0
		Hibah Masuk		0
		... Dst		0
3	Dst ...	Dst ...		0
TOTAL				0

b. MUTASI KURANG BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	Transfer Masuk		0
		Hibah Masuk		0
		... Dst		0
2	Peralatan dan Mesin	Transfer Masuk		0
		Hibah Masuk		0
		... Dst		0
3	Dst ...	Dst ...		0
TOTAL				0

c. PENYUSUTAN BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS PENYUSUTAN	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peralatan dan Mesin	Penyusutan Pertama Kali	0
		Penyusutan Transaksional	0
		Penyusutan Reguler	0
2	Gedung dan Bangunan	Penyusutan Pertama kali	0
		Penyusutan Transaksional	0
		Penyusutan Reguler	0
3	Dst ...	Dst ...	0
TOTAL			0

VII. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada periode Semester II Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 0,- (nol) dengan rincian sebagai berikut :

IX. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Saldo awal periode Semester II Tahun Anggaran 2016 terdapat selisih antara penyajian nilai BMN menurut LBKP dan LKKL sebesar Rp.0 Dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

a.

Terdapat koreksi audit dari BPK sebesar Rp..0 dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

a.

Terdapat selisih nilai antara total mutasi tambah BMN berupa Aset Tetap dan Aset Lain-lain berupa Aset tidak berwujud selama periode berjalan (pembelian BMN, Penyelesaian pembangunan BMN langsung, pengembangan BMN langsung, perolehan KDP dan pengembangan KDP) dengan total realisasi belanja modal sebesar Rp.0 dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

a.

LAMPIRAN BERITA ACARA

DAFTAR SPM/SP2D

I. TANDA TANGAN	
	
keuangan	barang

II. PERIODE	
S II	/ 1 6
<bln/smt/thn>	<tahun>

III. UNIT ORGANISASI											
1. Kode	0 0 5	-	0 3	-	0 4 0 0 0	-	4 0 0 1 7 3	-	0 0 0	-	K D
	<bagian anggaran>		<eselon-1>		<wilayah>		<satuan kerja>		<pembantu>		<jenis kewenangan>
2. Nama	PENGADILAN NEGERI BANTUL										

IV. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL PEMBENTUK BMN							
NO	NO. SP2D	TGL SP2D	JNS BLJ	URAIAN JNS BELANJA	RUPIAH SPM	TOT RPH SPPA	SELISIH
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

V. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA NON MODAL PEMBENTUK BMN							
NO	NO. SP2D	TGL SP2D	JNS BLJ	URAIAN JNS BELANJA	RUPIAH SPM	TOT RPH SPPA	SELISIH
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

VI. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL YANG TIDAK/BELUM PEMBENTUK BMN						
NO	NO. SP2D	TGL SP2D	JNS BLJ	URAIAN JNS BELANJA	RUPIAH SPM	KETERANGAN
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KPKNL YOGYAKARTA
GKN Yogyakarta, Jl. Kusumanegara No. 11, Yogyakarta

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL (BADILUM) (005030400400173000KD)
PERIODE SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR : BAR02-157/WKN.09/KNL.06/2017

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga belas bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh belas, bertempat di KOTA YOGYAKARTA, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Dany Kuryanto
NIP : 197208031999031001
Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola Barang pada KPKNL YOGYAKARTA untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- II. Nama : Niken Kusumaratri S, S.H.
NIP : 198305262002122001
Jabatan : Plt. Sekretaris
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung jawab unit akuntansi barang pada PENGADILAN NEGERI BANTUL (BADILUM) (005030400400173000KD) untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada PENGADILAN NEGERI BANTUL (BADILUM) (005030400400173000KD) dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dan Laporan Barang Milik Negara / Kantor Daerah (LBMN-KD) untuk periode Semester II, Tahun Anggaran 2016, dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

NO	AKUN NERACA	Nilai BMN Periode Semester II Tahun 2016		
		SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	POSISI BMN DI NERACA	7,116,000	(6,849,250)	266,750
A	ASET LANCAR	7,116,000	(6,849,250)	266,750
1	Persediaan 1)	7,116,000	(6,849,250)	266,750
B	ASET TETAP	0	0	0
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0	0	0
C	ASET LAINNYA	0	0	0
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0
2	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
3	Akumulasi Amortisasi	0	0	0
4	Aset Lain-lain 2)	0	0	0
5	Akumulasi Penyusutan atas Aset Lainnya	0	0	0
6	Akumulasi Amortisasi	0	0	0
II	BMN NON NERACA	0	0	0
A	EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0
1	BMN Ekstrakomptabel	0	0	0
2	Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel	0	0	0
B	BPYBDS	0	0	0
C	BARANG HILANG	0	0	0
D	BARANG RUSAK BERAT	0	0	0
E	ASET BMN EKS DK/TP SEBELUM TA 2011	0	0	0
TOTAL I + II		7,116,000	(6,849,250)	266,750

- 1) Nilai Mutasi Persediaan yang disajikan berupa selisih antara saldo akhir dan saldo awal Persediaan;
2) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset Lain-lain berupa BMN;
3) Rincian terlampir.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KPKNL YOGYAKARTA
GKN Yogyakarta, Jl. Kusumanegara No. 11, Yogyakarta

- 2 -

- II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBKP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Semester II Tahun 2016, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



Niken Kusumaratri S, S.H.
NIP. 196305262002122001

Salah satu yang paling sesuai

PIHAK PERTAMA,



Dedy Kuryanto
NIP. 197208031999031001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA, TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KPKNL YOGYAKARTA
GKN Yogyakarta, Jl. Kusumanegara No. 11, Yogyakarta

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL (BADILUM) (005030400400173000KD)
PERIODE SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2016

I. REKONSILIASI SALDO AWAL DATA BARANG MILIK NEGARA

PERKIRAAN NERACA		SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
KODE	URAIAN		TAMBAH	KURANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	POSISI BMN DI NERACA	7,116,000	0	0	7,116,000
11	ASET LANCAR	7,116,000	0	0	7,116,000
1171	Persediaan 1)	7,116,000	0	0	7,116,000
13	ASET TETAP	0	0	0	0
1311	Tanah	0	0	0	0
1321	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
1371	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
1331	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
1372	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
1341	Jalan, Injeksi dan Jaringan	0	0	0	0
1373	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
1351	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
1374	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
1361	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0
16	ASET LAINNYA	0	0	0	0
1611	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0
169111	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
162	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0
16931	Akum. Amortisasi	0	0	0	0
1661	Aset Lain-lain 2)	0	0	0	0
169122	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
16932	Akum. Amortisasi	0	0	0	0
II	BMN NON NERACA	0	0	0	0
A	EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0	0
1	BMN Ekstrakomptabel	0	0	0	0
2	Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel	0	0	0	0
B	BPYBDS	0	0	0	0
C	BARANG HILANG	0	0	0	0
D	BARANG RUSAK BERAT	0	0	0	0
E	ASET BMN EKS DK/TP SEBELUM TA 2011	0	0	0	0
TOTAL I + II		7,116,000	0	0	7,116,000

1) Nilai koreksi Persediaan yang disajikan berupa selisih antara saldo awal setelah koreksi dan saldo awal sebelum koreksi;
2) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan, Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan dan Aset Lain-lain berupa BMN.

Total nilai koreksi saldo awal sebesar Rp dengan penjelasan sebagai berikut:

a.

b.

II. PEMUTAKHIRAN DAN REKONSILIASI DATA BMN PERIODE BERJALAN

a. Pemutakhiran dan Mutasi Barang Milik Negara

PERKIRAAN NERACA		SALDO AWAL Per 01-01-2016	MUTASI		SALDO AKHIR Per 31-12-2016
KODE	URAIAN		TAMBAH	KURANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	POSISI BMN DI NERACA	7,116,000	230,000	7,079,250	266,750
11	ASET LANCAR	7,116,000	230,000	7,079,250	266,750
1171	Persediaan 1)	7,116,000	230,000	7,079,250	266,750
13	ASET TETAP	0	0	0	0
1311	Tanah	0	0	0	0
1321	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
1371	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
1331	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
1372	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
1341	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
1373	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
1351	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
1374	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
1361	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0
16	ASET LAINNYA	0	0	0	0
1611	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0
169111	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
162	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0
16931	Akum. Amortisasi	0	0	0	0
1661	Aset Lain-lain 2)	0	0	0	0
169122	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
16932	Akum. Amortisasi	0	0	0	0
II	BMN NON NERACA	0	0	0	0
A	EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0	0
1	BMN Ekstrakomptabel	0	0	0	0
2	Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel	0	0	0	0
B	BPYBDS	0	0	0	0
C	BARANG HILANG	0	0	0	0
D	BARANG RUSAK BERAT	0	0	0	0
E	ASET BMN EKS DK/TP SEBELUM TA 2011	0	0	0	0
TOTAL I + II		7,116,000	230,000	7,079,250	266,750

1) Nilai mutasi Persediaan yang disajikan berupa selisih antara saldo akhir dan saldo awal Persediaan;

2) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan, Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan dan Aset Lain-lain berupa BMN.

b. Rekonsiliasi Data Transaksi Pembentuk BMN yang berasal dari APBN

No	Nilai	Belanja Modal	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)
1	0	0	0

*) Nilai yang disajikan hanya dari transaksi yang terkait dengan pengeluaran APBN dengan SPM/SP2D seperti Pembelian, Penyelesaian Pembangunan Langsung, Pengembangan Nilai Aset, Perolehan/Penambahan KDP, dan Pengembangan KDP

c. Rekonsiliasi Data Transaksi Pembentuk BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dan Pengurang BMN

i. Mutasi Tambah BMN

No	Perkiraan Neraca	Jenis Transaksi	Kuantitas	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			0	0
TOTAL				

ii. Mutasi Kurang BMN

No	Perkiraan Neraca	Jenis Transaksi	Kuantitas	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			0	0
TOTAL				

iii. Penyusutan BMN berupa Aset Tetap

No.	Perkiraan Neraca	Jenis Transaksi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(5)
			0
TOTAL			

iv. Amortisasi BMN berupa Aset Tak Berwujud

No.	Perkiraan Neraca	Jenis Transaksi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(5)
			0
TOTAL			

III. REKONSILIASI PENGELOLAAN BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

No	Uraian	Belum Ditetapkan Status Penggunaan		Telah Ditetapkan Status Penggunaan	
		Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1	Tanah	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
4	Jalan	0	0	0	0
5	Irigasi	0	0	0	0
6	Jembatan	0	0	0	0
7	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
JUMLAH		0	0	0	0

b. Pengelolaan BMN

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindahtanganan	Penghapusan	Jumlah
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Dalam Proses Pengajuan Permohonan ke Pengguna Barang	0	0	0	0	0
2	Dalam Proses Pengajuan Permohonan ke Pengelola Barang	0	0	0	0	0
3	Dalam Proses Pengelola Barang	0	0	0	0	0
4	Selesai Di Pengelola Barang (Dikembalikan)	0	0	0	0	0
5	Selesai Di Pengelola Barang (Ditolak)	0	0	0	0	0
6	Selesai Di Pengelola Barang (Disetujui)	0	0	0	0	0
7	Dalam Proses tindak lanjut pengguna/kuasa pengguna barang	0	0	0	0	0
8	Telah diterbitkan SK dari Pengguna barang	0	0	0	0	0
9	Tindak Lanjut Oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
10	Selesai Serah terima	0	0	0	0	0
11	Gagal/Batal Proses	0	0	0	0	0

IV. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN

Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada periode Semester II Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut :

PNBP DARI SATKER

No.	Kode Perkiraan	Nama Perkiraan Nilai PNBP	Nilai PNBP

PNBP DARI APLIKASI SIMPONI

No.	Kode Perkiraan	Nama Perkiraan Nilai PNBP	Nilai PNBP

V. INFORMASI PENTING LAINNYA

a. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penatausahaan BMN :

No	Uraian

b. Langkah tindak lanjut ke depan yang perlu diambil dalam rangka penyelesaian permasalahan penatausahaan BMN adalah :

No	Uraian

c. Tindak lanjut temuan BPK terkait BMN :

No	Uraian

d. Terdapat Perbedaan Nilai BMN antara PENGADILAN NEGERI BANTUL (BADILUM) dengan KPKNL yang disebabkan :

No	Uraian

PIHAK KEDUA,

Niken Kusumawati S, S.H.
NIP.198305262002122001

PIHAK PERTAMA,

Dani Kuryanto
NIP.197208031999031001